

No	Sasaran Strategis (Sastra)/IKU	Satuan	Target		Realisasi Tw II	Capaian (%)		Rata-rata Capaian s.d Tw II 2023
			Tahun 2023	S.d Tw II		Tahun 2023	s.d Tw II	
K/L/Badan Usaha								
6.1	Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	48	Nihil	47	97.92	Nihil	
6.2	Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3	Jumlah	10	3	7	70.00	233.33	
7	Meningkatnya Kualitas Layanan Deputi Bidang Akuntan Negara							33,33
7.1	Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan	Indeks Skala 100	80	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
7.2	Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
7.3	Jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan	Jumlah	1	Nihil	1	100,00	100,00	
8	Meningkatnya Kualitas Implementasi Pengendalian Risiko pada Deputi Bidang Akuntan Negara							Nihil
8.1	Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja)	Persen	70	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
8.2	Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja)	Persen	100	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
9	Meningkatnya Kualitas Manajemen Kinerja pada Deputi Bidang Akuntan Negara							Nihil
9.1	Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan	Persen	100	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
9.2	Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu	Persen	100	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	
9.3	Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja	Persen	100	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur Triwulan II Tahun 2023 sebagaimana Tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1 Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah

Pencapaian Sasaran Strategis (sastra) 1 ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik.
2. Jumlah BUMN dengan kinerja sehat.

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 1 adalah sebagai berikut:

**1.1.
Jumlah
Badan Usaha
dengan
Tingkat
Dukungan
Fiskal
terhadap
Keuangan
Negara dan
Daerah
Kategori Baik**

Indikator jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik BUMN (C.4.a).

Badan Usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori baik adalah badan usaha yang mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Penilaian dilakukan melalui pengukuran Dimensi 2 ICORPAX (*Indonesian Corporate Accountability Index*), yaitu akuntabilitas korporasi pada keuangan negara.

Pengukuran atas dimensi ini didasarkan pada tujuan BUMN dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak dan dividen. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ini, maka syarat utama yang harus terpenuhi adalah korporasi harus memiliki tingkat kesehatan yang baik, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.

Tingkat keberhasilan terhadap dimensi ini diukur dengan 2 indikator yaitu Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi dan Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara, yang didukung dengan parameter sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi
 - a. Kesehatan Keuangan Korporasi.
 - b. *Growth* Kinerja Keuangan.
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara
 - a. Capaian target *dividend payout ratio*.
 - b. Persentase realisasi pembayaran pajak.
 - c. Persentase realisasi pembayaran penerimaan negara lainnya.
 - d. Kontribusi dividen BUMN terhadap target dividen nasional (APBN).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sejumlah 16 badan usaha dengan kategori “Baik”. Per Triwulan II Tahun 2023, dari 34 BUMN yang dilakukan penilaian ICORPAX, sebanyak 21 BUMN untuk Dimensi 2 ICORPAX – Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara telah mencapai skor diatas 60%, atau memperoleh predikat “Baik” dan “Sangat Baik”, sehingga penilaian atas indikator ini adalah sebesar 131,25% (21/16).

Rincian 21 BUMN dengan hasil skor Dimensi 2 ICORPAX kategori “Baik” dan “Sangat Baik” disajikan dalam Lampiran 1.1.

1.2. Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

Indikator persentase BUMN dengan kinerja sehat mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik BUMN (C.4.a).

Tingkat kesehatan keuangan korporasi diukur dengan menggunakan parameter kesehatan keuangan korporasi dan *growth* kinerja keuangan. Pengukuran menggunakan hasil skor Dimensi 2 ICORPAX parameter Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%). Sub parameter yang diukur adalah sebagai berikut:

- a. Kesehatan Keuangan Korporasi
- b. *Growth* Kinerja Keuangan dalam periode 2 tahun

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2023 sebesar 19 BUMN dengan Kinerja Sehat. Per Triwulan II Tahun 2023, dari 34 BUMN yang dilakukan penilaian ICORPAX, sebanyak 23 BUMN untuk Dimensi 2 ICORPAX parameter Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara telah mencapai skor diatas 60%, atau memperoleh predikat “Baik” dan “Sangat Baik”, sehingga penilaian atas indikator ini adalah sebesar 121,05% (23/19).

Rincian 23 BUMN dengan hasil skor Dimensi 2 ICORPAX

parameter Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara kategori “Baik” dan “Sangat Baik” disajikan dalam Lampiran 1.2.

2

Sasaran Strategis 2:

Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional

Pencapaian Sasaran Strategis 2 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 2 adalah sebagai berikut:

2.1.

Jumlah Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan terhadap Pembangunan Nasional Kategori Baik

Indikator jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik BUMN (C.4.a).

Badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik adalah badan usaha yang mampu mendukung pembangunan nasional. Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional diukur dengan menggunakan parameter tingkat kinerja dan tingkat dukungan pada agenda pembangunan. Tingkat kinerja korporasi dinilai berdasarkan capaian KPI Korporasi atau KPI Direksi yang mewakili korporasi, yang terdapat di dalam *annual report*.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX, yaitu Dukungan Korporasi pada Pembangunan yang terdiri dari 2 parameter serta dijabarkan ke dalam 4 sub parameter utama dan satu sub parameter penalti, yaitu:

1. Tingkat Kinerja Korporasi (bobot 7,5%)
 - Pencapaian target *Key Performance Indicator* (KPI).
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (bobot 22,5%)
 - a. Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah.
 - b. Penugasan pemerintah.

- c. Cakupan penugasan pemerintah.
- d. Pencapaian target penugasan.
- e. Penugasan dari pemerintah yang bermasalah.

Sub parameter penalti akan diperhitungkan apabila terdapat informasi tentang proyek-proyek atau penugasan Pemerintah pada korporasi yang mangkrak/berhenti/terbengkalai.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2022 sejumlah 14 badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik. Per Triwulan II Tahun 2023, dari 34 BUMN yang dilakukan penilaian ICORPAX, sebanyak 23 BUMN untuk Dimensi 1 ICORPAX telah mencapai skor diatas 60%, atau memperoleh predikat “Baik” dan “Sangat Baik”, sehingga penilaian atas indikator ini adalah sebesar 164,29% (23/14).

Rincian 23 BUMN dengan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX kategori “Baik” dan “Sangat Baik” disajikan dalam Lampiran 1.3.

**3 Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha**

Pencapaian Sasaran Strategis 3 ditunjukkan pencapaian satu indikator kinerja yaitu Jumlah Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik, dengan kriteria BUMN yang mampu:

1. Mengelola proses bisnisnya dengan baik.
2. Memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik.
3. Mengelola aset dengan efektif.
4. Melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan TJSL) secara efektif.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 3 adalah sebagai berikut:

3.1. Jumlah Badan Usaha dengan	Indikator jumlah badan usaha dengan efektivitas operasional baik mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik BUMN (C.4.a).
---	--

Efektivitas Operasional Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan rincian parameter untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

1. Tingkat Kepatuhan
 - a. Permasalahan Hukum yang Dihadapi
 - b. Kepatuhan terhadap Regulasi Industri Tertentu
2. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
 - a. Keberadaan Struktur Pengelola TJSL
 - b. Keselarasan Program TJSL dengan Program prioritas pencapaian SDG's
 - c. Keberadaan Program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *creating share value* (CSV) bagi perusahaan
 - d. Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha
3. Tingkat Kepuasan
 - a. Indeks Kepuasan Pelanggan
 - b. Indeks Kepuasan *Vendor*
 - c. *Employee Engagement*
4. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis
 - a. Capaian KPI Operasional Korporasi
 - b. Penerapan *E-Procurement*
 - c. Keberadaan Inovasi
 - d. Penerapan Teknologi Informasi
 - e. Pengelolaan SDM
5. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset
 - a. *Asset Management Policy*
 - b. *Asset Management Plans*
 - c. *Asset Portfolio*
 - d. *Persentase Nilai Aset Idle* terhadap Total Aset
 - e. *ROA (Return on Asset)*

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa

Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 20 badan usaha dengan efektivitas operasional baik. Per Triwulan II Tahun 2023, dari 34 BUMN yang dilakukan penilaian ICORPAX, sebanyak 32 BUMN untuk Dimensi 3 ICORPAX telah mencapai skor diatas 60%, atau memperoleh predikat “Baik” dan “Sangat Baik”, sehingga penilaian atas indikator ini adalah sebesar 160% (32/20).

Rincian 32 BUMN dengan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX kategori “Baik” dan “Sangat Baik” disajikan dalam Lampiran 1.4.

**4 Sasaran Strategis 4:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD**

Pencapaian Sasaran Strategis 4 ditunjukkan dengan jumlah BUMN dengan tata kelola korporasi baik. Indikator persentase badan usaha dengan tata kelola korporasi baik mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik BUMN (C.4.a).

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 4 adalah sebagai berikut:

<p>4.1. Persentase Badan Usaha dengan Tata Kelola Korporasi Baik</p>	<p>BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMN harus menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko dan kepatuhan untuk memastikan perusahaan berjalan pada koridor yang seharusnya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi korporasi, khususnya BUMN agar menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik. Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015, BUMN diharuskan melakukan asesmen terhadap tata kelola dan menerapkan manajemen risiko dan pengendalian internal. Asesmen penerapan GCG ditujukan untuk memastikan</p>
---	--

efektivitas penerapan dan perbaikan tata kelola BUMN.

Asesmen penerapan GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.06/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan, serta kriteria dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 505/KMK.06/2020 tentang Pedoman Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Perusahaan Perseroan (Persero) di Bawah Pembinaan dan Pengawasan Menteri Keuangan. Asesmen GCG dilakukan melalui penilaian atas 572 faktor yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil asesmen berupa skor GCG, sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Indikator persentase BUMN dengan tata kelola korporasi baik diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan tata kelola baik dibagi jumlah total BUMN.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 12 BUMN dengan tata kelola korporasi baik. Per Triwulan II Tahun 2023 telah dilakukan asesmen terhadap 8 BUMN dengan hasil sebanyak 6 BUMN dengan kategori "Sangat Baik" dan 2 BUMN dengan kategori "Baik", sehingga capaian kinerja indikator ini

adalah sebesar 66,67% (8/12).

Daftar 8 BUMN yang telah dilakukan *assessment* GCG adalah sebagai berikut:

No	BUMN/Anak Perusahaan	Skor	Predikat
1	PT Permodalan Nasional Madani	88,251	Sangat Baik
2	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	89,07	Sangat Baik
3	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	88,17	Sangat Baik
4	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	87,34	Sangat Baik
5.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	85,39	Sangat Baik
6.	PT Surveyor Indonesia (Persero)	89,10	Sangat Baik
7.	PT ASABRI (Persero)	82,50	Baik
8.	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	77,79	Baik

5 Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha

Pencapaian Sasaran Strategis 5 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator jumlah badan usaha dengan akuntabilitas badan usaha yang baik mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik BUMN (C.4.a).

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 5 adalah sebagai berikut:

5.1. Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik

Sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dari korporasi pada umumnya. Dalam kapasitas demikian, BUMN memiliki kewajiban akuntabilitas bukan hanya kepada pemilik saham tetapi juga pada *stakeholders* yang lebih luas. Sesuai pengungkapan OECD dimana BUMN memiliki kompleksitas dalam akuntabilitas, maka penilaian atas akuntabilitas BUMN harus diukur tidak hanya dalam satu dimensi penilaian kinerjanya saja, tetapi juga memperhatikan

dimensi-dimensi lainnya.

Pengukuran indikator kinerja meningkatnya akuntabilitas Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan total skor penilaian indeks akuntabilitas BUMN (*Indonesian Corporate Accountability Index/ICORPAX*). ICORPAX sebagai suatu instrumen yang dikembangkan oleh Deputi Akuntan Negara BPKP bertujuan untuk mengukur akuntabilitas korporasi sebagai pengelola KNYD dalam rangka mendukung pembangunan sesuai maksud dan tujuan pembentukan BUMN itu sendiri. Indeks ini disebut ICORPAX karena instrumen yang dihasilkan merupakan rancangan pengukuran yang mencakup seluruh parameter pengukuran individual atas peran BUMN sebagai korporasi milik negara.

Pengukuran akuntabilitas Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan penilaian komposit dari 5 dimensi dalam pengukuran ICORPAX, yaitu:

1. Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan.
2. Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara.
3. Kepatuhan dan Efektivitas Operasi.
4. Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi.
5. Efektivitas Pengendalian *Fraud*.

Simpulan penilaian kemudian dibuat berdasarkan penilaian terhadap kelima dimensi tersebut dengan menggunakan pembobotan untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

I. *Lagging Indicators*

1. Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan
 - a. Tingkat Kinerja Korporasi
 - b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan
2. Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara
 - a. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi
 - b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara

II. *Leading Indicators*

1. Kepatuhan dan Efektivitas Operasional
 - a. Tingkat Kepatuhan
 - b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL)
 - c. Tingkat Kepuasan
 - d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis
 - e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset
2. Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi
 - a. Tingkat Efektivitas Tata Kelola Perusahaan (GCG)
 - b. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko
 - c. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawas Internal
 - d. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal
3. Efektivitas Pengendalian *Fraud* (10%)
 - a. *Anti Fraud Policy*
 - b. *Fraud Risk Assessment*
 - c. *Fraud Detection, Prevention and Correction*
 - d. Tingkat Kejadian *Fraud* (*Penalty* terhadap total nilai capaian ICORPAX)

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2023 sejumlah 11 BUMN dengan akuntabilitas baik. Per Triwulan II Tahun 2023, dari 34 BUMN yang dilakukan penilaian ICORPAX, sebanyak 31 BUMN untuk capaian skor ICORPAX telah mencapai skor diatas 60%, atau memperoleh predikat “Baik” dan “Sangat Baik”, sehingga penilaian atas indikator ini adalah sebesar 281,82% (31/11). Rincian 31 BUMN dengan hasil skor ICORPAX kategori “Baik” dan “Sangat Baik” disajikan dalam Lampiran 1.5.

6

**Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha**

Pencapaian Sasaran Strategis 6: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha, ditunjukkan oleh

pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3
2. Jumlah BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 6 adalah sebagai berikut:

6.1.
Jumlah
BUMN
dengan MRI \geq
Level 3

Indikator jumlah BUMN dengan MRI \geq Level 3 mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik Maturitas SPIP/MRI – Kementerian/Lembaga (G.1.d).

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Manajemen Risiko (MR) adalah serangkaian prosedur dan metodologi terstruktur yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memperlakukan, dan memantau risiko yang timbul dari seluruh kegiatan usaha BUMN, mencakup Sistem Pengendalian Intern, dan Tata Kelola Terintegrasi.

Asesmen tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk management maturity level*) pada Badan Usaha (BUMN, BUMD, BLUD). Tujuannya untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan level maturitas \geq 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antara lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN yang dilakukan asesmen maturitas dan *mapping* manajemen risiko. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 48 BUMN dengan MRI \geq Level 3. Per Triwulan II Tahun 2023, terdapat 47 BUMN dengan MRI \geq Level 3, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 97,92% (47/48).

Rincian 47 BUMN dengan MRI \geq Level 3 disajikan dalam Lampiran 1.6.

6.2.
Jumlah
BUMN
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3

Indikator jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 mendukung Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP pada topik Kapabilitas APIP – Kementerian/Lembaga (G.1.f).

Dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik, korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, pasal 29 ayat (6) menyebutkan bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di BUMN. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern secara berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik dan efisiensi serta efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan dari *stakeholders*-nya.

Peraturan di atas memperkuat opini mengenai penguatan fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN

merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui manajemen penyelenggaraan korporasi yang sehat dan kuat. Hal ini disebabkan audit internal memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan korporasi serta mencegah dilakukannya tindakan yang tidak sesuai dengan kaidah penyelenggaraan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern. Indikator ini diukur dengan menggunakan Jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada Tahun 2023 sebanyak 10 BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3. Per Triwulan II Tahun 2023, belum dilakukan kegiatan penilaian kapabilitas SPI pada BUMN. Capaian kapabilitas SPI dihitung secara kumulatif atas hasil penilaian yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Dengan demikian capaian kinerja BUMN dengan kapabilitas SPI \geq Level 3 per Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 7 BUMN, sehingga capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 70,00% (7/10).

Daftar 7 BUMN dengan capaian kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

No	Nama BUMN/Anak Perusahaan	Level
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	3
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	3
3	PT Pupuk Kujang (PKC)	3
4	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	3
5	PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero)	3 DC
6	PT Industri Kereta Api (Persero)	3
7	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	3 DC

7 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara

Pencapaian Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara, ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan.
2. Jumlah layanan eksternal yang dapat dijalankan menggunakan teknologi informasi.
3. Jumlah Inovasi Layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan.

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 7 adalah sebagai berikut:

7.1. Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan

Target indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur pada tahun 2023 adalah sebesar 80 (skala 1 s.d. 100). Realisasi indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur berdasarkan hasil survei kepuasan *stakeholders* yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

7.2. Jumlah Layanan Eksternal yang Dapat Dijalankan Menggunakan Teknologi Informasi

Tahun 2022 Deputi Bidang Akuntan Negara mengembangkan aplikasi FORSA untuk memantau kinerja seluruh unit kerja Direktorat dan Perwakilan disamping sebagai alat bantu (*tools*) untuk menyusun Laporan Hasil Pengawasan Deputi Bidang Akuntan Negara.

Aplikasi FORSA secara kontinyu dilakukan pembaruan fitur untuk mengakomodasi perubahan aktivitas pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Deputi Bidang Akuntan Negara.

Hasil pengawasan intern dipantau secara berkala dengan tujuan mengingatkan unit kerja yang belum menginput sintesa hasil pengawasan dalam aplikasi FORSA. Sintesa Hasil pengawasan menjadi bahan yang paling signifikan pada saat menyusun Laporan Hasil Pengawasan yang disampaikan kepada Presiden dan Menteri BUMN.

Penilaian capaian indikator ini berdasarkan implementasi aplikasi FORSA akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

**7.3.
Jumlah
Inovasi
Layanan**

Pada tahun 2023, Deputi Bidang Akuntan Negara mengembangkan aplikasi *GCG on Cloud* untuk memudahkan validasi skor hasil asesmen GCG pada BUMN, serta sebagai sarana penyimpanan *database* profil BUMN. Pada Triwulan II Tahun 2023, aplikasi *GCG on Cloud* masih dalam pengembangan oleh *system programmer*, sehingga belum dapat diimplementasikan oleh pengguna.

Secara umum, aplikasi *GCG on Cloud* nantinya akan memuat Profil BUMN, Skor Hasil Asesmen GCG (sampai dengan Unsur Penilaian/UP), dan dapat mencetak ringkasan skor hasil asesmen untuk ditandatangani oleh mitra.

Berdasarkan pengembangan aplikasi yang telah dilakukan sebagai inovasi layanan, realisasi indikator jumlah inovasi layanan yang mampu memberikan dampak terhadap percepatan dan peningkatan kualitas layanan pada Triwulan II Tahun 2023 adalah sebanyak 1 (satu) aplikasi.

8

**Sasaran Strategis 8:
Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada
Deputi Akuntan Negara**

Pencapaian Sasaran Strategis 8: Meningkatnya kualitas implementasi pengendalian risiko pada Deputi Akuntan Negara, ditunjukkan oleh pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase Efektivitas Pengendalian Intern (SPIP Unit Kerja).
2. Persentase Penyelesaian RTP (MRI Unit Kerja).

Uraian kinerja atas 2 indikator kinerja sastra 8 adalah sebagai berikut:

**8.1.
Persentase
Efektivitas
Pengendalian**

Target indikator kinerja persentase efektivitas pengendalian intern (SPIP Unit Kerja) pada tahun 2023 adalah 70%.

Pengendalian intern efektif jika hasil analisis atas risiko inheren dapat menurunkan tingkat risiko sampai pada

**Intern (SPIP
Unit Kerja)**

tingkat risiko yang dapat diterima atau berada di bawah selera risiko. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

**8.2.
Persentase
Penyelesaian
RTP (MRI
Unit Kerja)**

Target indikator kinerja ini adalah 100% yang artinya seluruh RTP telah dilaksanakan. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

9

**Sasaran Strategis 9:
Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Akuntan
Negara**

Pencapaian Sasaran Strategis 9: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Akuntan Negara, ditunjukkan oleh pencapaian tiga indikator kinerja yaitu:

1. Persentase keselarasan rencana program kerja pengawasan tahunan dengan agenda prioritas pengawasan.
2. Persentase Dokumen pelaporan manajerial BPKP yang disusun tepat waktu.
3. Persentase tindak lanjut rekomendasi perbaikan manajemen kinerja.

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja sastra 8 adalah sebagai berikut:

**9.1.
Persentase
Keselarasan
Rencana
Program
Kerja
Pengawasan
Tahunan
dengan
Agenda
Prioritas
Pengawasan**

Program Kerja Pengawasan Tahunan disusun berdasarkan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja dan Agenda Prioritas Pengawasan. Program Kerja Pengawasan Tahunan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur telah selaras dengan Perjanjian Kinerja dan Agenda Prioritas Pengawasan. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

**9.2.
Persentase
Dokumen
Pelaporan
Manajerial**

Indikator kedua untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 9 Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputi Akuntan Negara adalah Persentase Dokumen Pelaporan Manajerial BPKP yang Disusun Tepat Waktu.

**BPKP yang
Disusun
Tepat Waktu**

Dokumen pelaporan manajerial yang disampaikan adalah Laporan Kinerja.

Laporan Kinerja disusun setiap triwulan dan wajib disampaikan kepada Biro Manajemen Kinerja, Organisasi, dan Tata Kelola (Biro MKOT) setiap tanggal 7 pada akhir triwulan.

Laporan Kinerja Deputy Akuntan Negara Triwulan II Tahun 2022 disampaikan tepat waktu.

**9.3.
Persentase
Tindak Lanjut
Rekomendasi
Perbaikan
Manajemen
Kinerja**

Indikator ketiga untuk mengukur pencapaian sasaran strategis 9: Meningkatnya kualitas manajemen kinerja pada Deputy Akuntan Negara adalah Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Perbaikan Manajemen Kinerja. Indikator ini diukur berdasarkan rekomendasi evaluasi SAKIP Tahun 2022 dari Inspektorat yang telah ditindaklanjuti. Penilaian capaian indikator ini akan dilaksanakan pada Triwulan IV.

B. Capaian *Output* Pengawasan Triwulan II Tahun 2023

Realisasi capaian *output* pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur per Triwulan II Tahun 2023 sebanyak 13 laporan atau mencapai 50% dari target *output* RO pada RKA tahun 2023 sebanyak 26 laporan, sebagaimana pada tabel berikut:

Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP Triwulan II Tahun 2023
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi Tw II 2023	Capaian (%)
1	4223.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	10	5	50,00
2	4223.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	2	2	100,00
3	4223.UAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	2	2	10,00
4	4223.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	4	2	50,00

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2023	Realisasi Tw II 2023	Capaian (%)
5	4223.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	3	2	66,67
6	4223.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	1	-	-
7	4223.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4	-	-

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, telah terealisasi anggaran sebesar Rp1.093.374.000,00 atau 44,58% dari total anggaran Tahun 2023 sebesar Rp2.452.539.000,00 dengan ringkasan sebagaimana tabel berikut:

Anggaran dan Realisasi Triwulan II Tahun 2023

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw II 2023 (Rp)	Capaian (%)
1	4223.FAG.028	Rekomendasi Hasil Pengawasan Strategis Nasional/Daerah	580.761.000	124.444.000	21,43
2	4223.FAG.711	Rekomendasi Hasil Koordinasi Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan, dan Tindak Lanjut	442.601.000	236.284.000	53,39
3	4223.UAG.U31	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Kekayaan Negara/Daerah yang Dipisahkan dan BLU/BLUD	500.000.000	458.863.500	91,77
4	4223.UAG.U21	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Sumber Daya Manusia	86.400.000	26.629.500	30,82
5	4223.UAG.U23	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Pembangunan Ekonomi	404.579.000	188.607.000	46,62
6	4223.UAG.U24	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Sektor Ketahanan Pangan	21.600.000	-	-

No	Kode	Indikator Kinerja Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Tw II 2023 (Rp)	Capaian (%)
7	4223.UAG.U53	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	416.598.000	58.546.000	14,05

D. Analisis Efisiensi SDM

Dukungan SDM Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur berdasarkan jenis jabatan adalah sebagai berikut:

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	4
2	Auditor Utama	1
3	Auditor Madya	5
4	Auditor Muda	8
5	Auditor Pertama	6
6	Auditor Terampil	4
7	NON-JFA	4
8	CPNS	1
	JUMLAH	33

Dukungan SDM Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur berdasarkan tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S3	1
2	S2	5
3	S1 / D-IV	18
4	D-III	7
5	SMA	2
	JUMLAH	33

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur secara berkala melakukan monitoring atas beban kerja dan kompetensi SDM untuk memastikan bahwa target pengawasan intern dan Agenda Prioritas Pengawasan (APP) BPKP dapat tercapai tepat waktu.

E. Faktor Pendukung Ketercapaian Kinerja

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur dapat mencapai target triwulan II tahun 2023 karena beberapa faktor, antara lain:

1. Sinergi antar sub Direktorat untuk menyelesaikan capaian target.

2. Pedoman pengawasan menjadi panduan kegiatan pengawasan baik di pusat maupun di perwakilan dan untuk menjaga standar mutu pengawasan.
3. Kompetensi sumber daya manusia yang cukup memadai untuk mendukung kegiatan pengawasan.
4. Mengembangkan dan menggunakan aplikasi dalam pengawasan guna mempermudah dan mempercepat pelaksanaan pengawasan yang dilakukan.

F. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2023, belum dijumpai kendala yang dapat menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

G. Rencana Tindak

Guna mempertahankan dan meningkatkan kinerja, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai dan Manufaktur menetapkan rencana tindak pada triwulan III tahun 2023 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kegiatan pengawasan dan pembinaan yang terkait dengan tata kelola, manajemen risiko dan kapabilitas satuan pengawas intern badan usaha.
2. Melakukan pengawasan terhadap permasalahan dan isu-isu strategis yang dihadapi oleh BUMN dalam menyelenggarakan operasi perusahaan dan mendukung pembangunan.
3. Mengembangkan metode pengawasan berbasis Teknologi Informasi (*database* dan aplikasi).
4. Meningkatkan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia.

Demikian kami sampaikan Laporan Kinerja Triwulan II Tahun 2023 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Jasa Keuangan, Jasa Penilai, dan Manufaktur. Atas perkenan Ibu Deputi untuk memberikan arahan lebih lanjut, kami ucapkan terima kasih.

Direktur,

Ditandatangani secara elektronik oleh

R. Ersi Soenarsih

**Rincian 21 Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan Fiskal terhadap
Keuangan Negara dan Daerah Kategori Baik**

No	Badan Usaha	Kategori
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Baik
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	Sangat Baik
3	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	Sangat Baik
4	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	Baik
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Sangat Baik
6	PT Dahana (Persero)	Baik
7	PT Pindad (Persero)	Baik
8	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Baik
9	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sangat Baik
10	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
11	PT Pegadaian (Persero)	Sangat Baik
12	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Baik
13	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Baik
14	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Baik
15	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Baik
16	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Baik
17	PT Semen Padang	Sangat Baik
18	PT Semen Tonasa	Baik
19	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Baik
20	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Baik
21	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Sangat Baik

Rincian 23 BUMN dengan Kinerja Sehat

No	Badan Usaha	Kategori
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Sangat Baik
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	Sangat Baik
3	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	Sangat Baik
4	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	Sangat Baik
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Sangat Baik
6	PT Dahana (Persero)	Sangat Baik
7	PT Pindad (Persero)	Baik
8	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Baik
9	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Sangat Baik
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sangat Baik
11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
12	PT Pegadaian (Persero)	Sangat Baik
13	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Sangat Baik
14	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
15	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Baik
16	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Baik
17	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Sangat Baik
18	PT ASABRI (Persero)	Baik
19	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Baik
20	PT Semen Padang	Sangat Baik
21	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Baik
22	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sangat Baik
23	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Sangat Baik

Rincian 23 Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan terhadap Pembangunan Nasional Kategori Baik

No	Badan Usaha	Kategori
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Sangat Baik
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	Sangat Baik
3	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	Sangat Baik
4	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	Sangat Baik
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Sangat Baik
6	PT Pindad (Persero)	Sangat Baik
7	PT Bio Farma (Persero)	Sangat Baik
8	PT Indofarma	Baik
9	PT Kimia Farma	Baik
10	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sangat Baik
11	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
12	PT Pegadaian (Persero)	Baik
13	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Sangat Baik
14	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
15	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Sangat Baik
16	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Sangat Baik
17	Perum Jaminan Kredit Indonesia	Sangat Baik
18	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Baik
19	PT Balai Pustaka (Persero)	Baik
20	PT Industri Kereta Api (Persero)	Baik
21	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sangat Baik
22	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Sangat Baik
23	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Sangat Baik

Rincian 32 Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

No	Badan Usaha	Kategori
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Sangat Baik
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	Sangat Baik
3	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	Sangat Baik
4	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	Sangat Baik
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Baik
6	PT Dahana (Persero)	Sangat Baik
7	PT Pindad (Persero)	Sangat Baik
8	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Baik
9	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Baik
10	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Sangat Baik
11	PT Bio Farma (Persero)	Baik
12	PT Indofarma	Baik
13	PT Kimia Farma	Sangat Baik
14	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sangat Baik
15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
16	PT Pegadaian (Persero)	Sangat Baik
17	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Sangat Baik
18	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Sangat Baik
20	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Sangat Baik
21	PT Jaminan Kredit Indonesia	Sangat Baik
22	PT ASABRI (Persero)	Sangat Baik
23	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
24	PT Semen Gresik	Baik
25	PT Semen Padang	Sangat Baik
26	PT Semen Tonasa	Baik
27	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Sangat Baik
28	PT Balai Pustaka (Persero)	Baik
29	PT Industri Kereta Api (Persero)	Baik
30	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sangat Baik
31	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Baik
32	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Sangat Baik

Rincian 31 Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik

No	Badan Usaha	Kategori
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	Sangat Baik
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	Sangat Baik
3	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	Sangat Baik
4	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	Sangat Baik
5	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	Sangat Baik
6	PT Dahana (Persero)	Baik
7	PT Pindad (Persero)	Sangat Baik
8	PT Dirgantara Indonesia (Persero)	Baik
9	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Baik
10	PT Surveyor Indonesia (Persero)	Baik
11	PT Bio Farma (Persero)	Sangat Baik
12	PT Indofarma	Baik
13	PT Kimia Farma	Baik
14	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Sangat Baik
15	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
16	PT Pegadaian (Persero)	Sangat Baik
17	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	Sangat Baik
18	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.	Sangat Baik
19	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	Sangat Baik
20	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	Sangat Baik
21	PT Jaminan Kredit Indonesia	Sangat Baik
22	PT ASABRI (Persero)	Baik
23	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk	Sangat Baik
24	PT Semen Gresik	Baik
25	PT Semen Padang	Baik
26	PT Semen Tonasa	Baik
27	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	Baik
28	PT Industri Kereta Api (Persero)	Baik
29	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	Sangat Baik
30	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	Sangat Baik
31	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	Sangat Baik

Rincian 47 BUMN dengan MRI \geq Level 3

No	Badan Usaha	Level	Predikat
1	PT Pupuk Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
2	PT Petrokimia Gresik (PKG)	4	<i>Managed</i>
3	PT Pupuk Kujang (PKC)	3	<i>Defined</i>
4	PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT)	3	<i>Defined</i>
5	PT Pupuk Iskandar Muda (PIM)	4	<i>Managed</i>
6	PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PSP)	3	<i>Defined</i>
7	PT Rekayasa Industri (REKIN)	3	<i>Defined</i>
8	PT Mega Eltra (ME)	3	<i>Defined</i>
9	PT Pupuk Indonesia Logistik (PILog)	3	<i>Defined</i>
10	PT Pupuk Indonesia Pangan (PIP)	3	<i>Defined</i>
11	PT Pindad (Persero)	3	<i>Defined</i>
12	PT PAL Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
13	PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
14	PT Sucofindo (Persero)	3	<i>Defined</i>
15	PT Surveyor Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
16	PT Bio Farma (Persero)	4	<i>Managed</i>
17	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.	4	<i>Managed</i>
18	PT Pegadaian (Persero)	4	<i>Managed</i>
19	PT Permodalan Nasional Madani (Persero)	3	<i>Defined</i>
20	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.	3	<i>Defined</i>
21	Perum Percetakan Uang Republik Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
22	PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
23	PT Asuransi Kredit Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
24	Perum Jaminan Kredit Indonesia	4	<i>Managed</i>
25	PT Jasa Raharja (Persero)	4	<i>Managed</i>
26	PT Asuransi Jiwasraya (Persero)	3	<i>Defined</i>
27	PT ASABRI (Persero)	4	<i>Managed</i>
28	PT TASPEN (Persero)	5	<i>Optimized</i>
29	PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)	4	<i>Managed</i>
30	PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.	4	<i>Managed</i>
31	PT Semen Gresik	3	<i>Defined</i>
32	PT Semen Padang	4	<i>Managed</i>
33	PT Semen Tonasa	4	<i>Managed</i>
34	PT Semen Baturaja (Persero) Tbk.	3	<i>Defined</i>
35	PT Kliring Berjangka Indonesia (Persero)	4	<i>Managed</i>
36	PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero)	3	<i>Defined</i>
37	PT Industri Kapal Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
38	PT Industri Kereta Api (Persero)	3	<i>Defined</i>
39	PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)	3	<i>Defined</i>
40	PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (Persero)	3	<i>Defined</i>
41	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	3	<i>Defined</i>

No	Badan Usaha	Level	Predikat
42	PT Bank Syariah Indonesia	3	<i>Defined</i>
43	PT Asuransi Ekspor Indonesia	4	<i>Managed</i>
44	PT Bahana Sekuritas	3	<i>Defined</i>
45	PT Asuransi Jiwa IFG	3	<i>Defined</i>
46	PT Bahana Kapital Investa	3	<i>Defined</i>
47	PT Bahana TCW Investment Management	3	<i>Defined</i>